

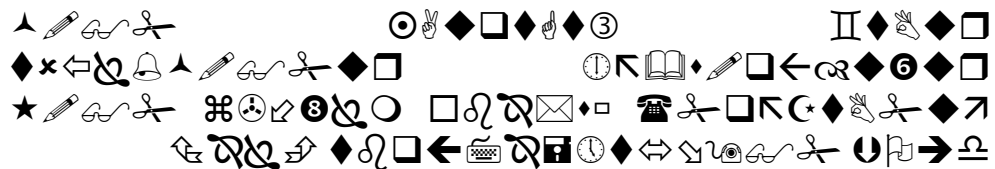
BAB III

KONSEP WALI DALAM PERNIKAHAN

A. Pengertian Wali

Kata “*wali*” merupakan bentuk isim fa’il dari kata “*wilayah*” atau “*walayah*.” “*wilayah*” secara bahasa berarti *al-qurb* (dekat), *al-Khiththah*, *al-imarah*, *al-sulthan* dan *al-qudrah* (kekuasaan), dengan demikian kata al-wali (bentuk isim fa’il) berarti orang yang memiliki kekuasaan. Sementara kalau dibaca fatah (*walayah*) berarti *al-nushrah* (pertolongan).¹

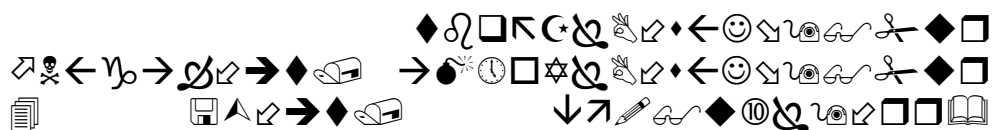
Di dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa wali secara bahasa berarti rasa cinta (*al-Mahabbah*) dan pertolongan (*al-nushrah*). Makna seperti ini bisa ditemukan di dalam Surat al-Ma’idah ayat 56:



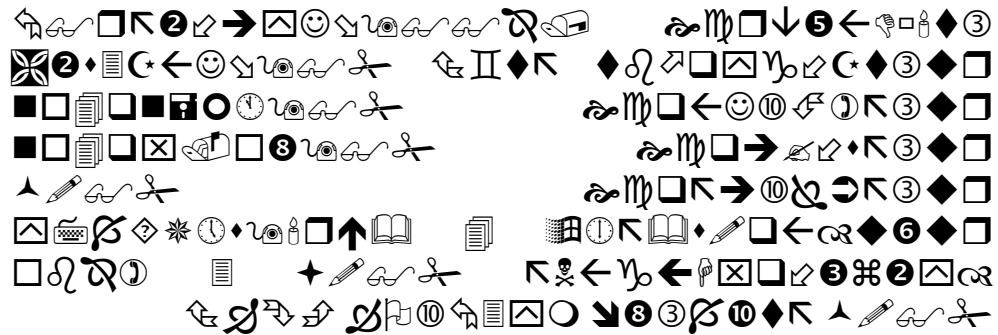
Artinya:

dan Barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, Maka Sesungguhnya pengikut (agama) Allah. Itulah yang pasti menang.

Makna wali dalam artian menolong juga bisa ditemukan di dalam Surat al-Taubah ayat 71:



¹ Ibnu Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/ 1984 M), juz. 6, hal. 141.



Artinya:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ibnu Faris mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan urusan orang lain maka ia disebut walinya.² Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa wilayah adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan urusan-urusan orang lain.³ Urusan orang lain yang dilakukan tersebut bisa jadi berkaitan dengan harta yang dimilikinya. Dengan kata lain seseorang memiliki kekuasaan untuk melakukan akad yang berkaitan dengan harta orang lain.⁴ Dalam hal ini kekuasaan untuk mengurus harta orang lain tersebut atau berakad terhadap harta orang lain disebut dengan *al-Wilayah 'ala al-Mal* (perwalian atas harta). Di samping itu urusan orang lain yang diurus tersebut juga bisa berkaitan dengan

² Ibnu Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t), juz 6, hal. 141.

³ Muhammad Abu Zahrah di dalam Kitab *al-Ahwal al-Syakhshiyah* membagi perwalian (*al-Wilayah*) secara garis besar kepada dua, yaitu *al-Wilayah al-Qashirah* dan *al-Wilayah al-Muta'addiyah*. *Al-Wilayah al-Qashirah* adalah kekuasaan yang dimiliki oleh orang yang berakad untuk berakad atas dirinya sendiri dan melaksanakan hukum-hukumnya. Sementara *al-Wilayah al-Muta'addiyah* adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang untuk berakad atas orang lain dan melaksanakan hukum-hukumnya. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah* (Kairo: Dar al-Ma'rifah, 1409 H/ 1989 M), hal. 107.

⁴ *Ibid*, hal. 108.

dirinya. Dengan kata lain seseorang memiliki kekuasaan untuk berakad terhadap diri orang lain.⁵ Dalam hal ini perwalian tersebut disebut dengan *al-Wilayah 'ala al-Nafs* (perwalian atas diri). Dengan demikian, dari sisi ini perwalian itu ada dua macam, yaitu *al-Wilayah 'ala al-Mal* dan *al-Wilayah 'ala al-Nafs*. Adapun perwalian di dalam pernikahan termasuk salah satu bentuk *al-Wilayah 'ala al-Nafs*.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang wali adalah:

1. Berakal dan Baligh

Wali disyaratkan berakal dan baligh menurut Jumhur Ulama. Maka tidak sah wali dari orang gila atau anak-anak karena mereka tidak memiliki kapasitas sebagai wali (ahliyah al-Wilayah).

2. Merdeka

3. Islam

4. Adil

Adil berarti kelurusan agama. Seseorang disebut adil dengan melaksanakan berbagai kewajiban agama serta menjauhi berbagai dosa yang besar, seperti berzina, minum khamar, durhaka kepada kedua orang tua, dan perbuatan dosa besar lainnya. Adil merupakan syarat yang dikemukakan oleh Mazhab Syafi'i di dalam salah satu pendapatnya dan Mazhab Hanbali. Dasar dari pendapat mereka adalah Hadits Rasulullah yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas:

⁵ *Ibid*, hal. 107.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدار قطني)⁶

Artinya:

Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. (HR. Dar al-Quthni).

Di samping itu, karena perwalian membutuhkan ketelitian dan pertimbangan kemaslahatan, maka perwalian tidak bisa diserahkan kepada orang-orang yang fasik, sebagaimana hal ini juga dipersyaratkan dalam persoalan perwalian harta.⁷

Keadilan yang dituntut dalam hal ini cukuplah keadilan yang bersifat zahir (jelas). Karena persyaratan keadilan secara zahir dan batin merupakan sesuatu yang sangat sulit diukur dan berat untuk dilaksanakan. Dikecualikan dari persyaratan adil ini adalah Wali Imamah, yaitu perwalian seorang penguasa terhadap rakyatnya. Begitu juga perwalian seorang tuan terhadap budaknya juga tidak dipersyaratkan adil.

Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tidak mensyaratkan adil di dalam perwalian. Dengan demikian menurut pendapat mereka seorang yang fasiq bisa saja menikahkan anak perempuannya, saudara atau anak perempuan saudaranya.

⁶ *Ibid*, hal. 314.

⁷ Wahbah al-Zuhaili

Di dalam sejarah juga tidak pernah ditemukan bahwa Rasulullah saw pernah melarang seseorang untuk menjadi wali dari anaknya karena kefasiqannya.⁸

Adil menurut bahasa adalah lawan dari kata “*al-Jaur*” (kezaliman). Secara bahasa bermakna “*al-Qashd fī al-Umur*” (menyengaja dalam berbagai urusan), yaitu urusan pertengahan di antara meninggalkan sesuatu (menyia-nyiaikan) dan melampaui batas. Dalam istilah ilmu fikih, ‘*adl* adalah seseorang yang kebaikannya mengalahkan keburukannya.⁹ Yaitu seseorang yang memiliki kehormatan yang tidak diragukan.¹⁰

‘*Adl* menjadi salah satu bahasan fiqh karena ia merupakan salah satu syarat yang diperbincangkan oleh para ulama di dalam berbagai persoalan fiqh, seperti Imam shalat, amil zakat, nazhir waqf, *ru’yah* hilal ramadhan, penerimaan keterangannya tentang arah kiblat, kesaksian dan lain-lain.

Dalam pernikahan, ulama berbeda pendapat dalam menetapkan adil sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali. Ulama Hanafiyyah dan salah satu pendapat yang masyhur di kalangan Malikiyyah mengatakan bahwa ‘*adl* bukanlah salah satu syarat wali nikah. Sementara

⁸ Wahbah al-Zuhaili}, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1405 H/ 1985 M), juz 7, hal. 34.

⁹ ‘Ali ibn ‘Abdul ‘Aziz ibn Hasan ibn ‘Ali ibn Isma’il al-Jurjani, *al-Ta’rifat*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hal. 327.

¹⁰ Tim Penyusun, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam, 1403 H/ 1983 M), juz. 30, hal. 254.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa 'adl merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali.¹¹

Lawan dari kata adil di dalam bahasan fiqih adalah fasiq. Fasiq (*al-Fisq*) bermakna keluar dari keta'atan, dari agama dan sikap istiqamah (*Khuruj 'An al-Tha'ah, 'an al-Din, 'an al-Istiqamah*).¹² Pada asalnya kata fasiq bermakna mengeluarkan sesuatu dari sesuatu yang lain dengan cara yang merusak.¹³ Makna yang seperti ini dapat ditemukan di dalam perkataan orang Arab :

فسق الرطب اذا خرج عن قشره

Telah fasiq (keluar) kurma basah apabila ia keluar dari kulitnya.¹⁴

Dalam istilah fiqih, mendefenisikan *fisq* dengan keluar dari ketaatan dan melampaui batas dengan melakukan kemaksiatan.¹⁵ Kefasikan itu muncul dengan melakukan dosa besar walaupun tidak sering. Atau karena sering melakukan dosa walaupun bukan dosa besar, akan tetapi dosa tersebut sudah menjadi kebiasaannya.

¹¹ Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/ 1988 M), juz. 6, hal. 466.

¹² Tim Penyusun, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam, 1403 H/ 1983 M), juz. 32, hal. 140.

¹³ *Ibid.* hal. 141.

¹⁴ *Ibid.* hal 141-142.

¹⁵ *Ibid.* hal 143.

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kefasikan kadang-kadang berbentuk meninggalkan kewajiban, dan kadang-kadang berbentuk melakukan sesuatu yang diharamkan.¹⁶

Di dalam sebuah hadits Rasulullah saw mengatakan :

17 

Artinya:

Menghina orang beriman adalah kefasikan, dan membunuhnya adalah kekufuran.

Di samping itu, ulama fikih membagi kefasikan kepada beberapa bentuk, yaitu:

1. *Al-Fisq al-Millah*, yaitu kefasikan orang yang beragama yang memiliki kebaikan dan juga memiliki kejahatan.
2. *Al-Fisq bi al-Ta'wil*, yaitu *al-Fisq al-Jarihah*, seperti minum khamar dan berzina.
3. *Al-Fisq bi al-I'tiqad*, seperti kaum Qadariyah dan Jabariyah.

5. Laki-laki

Menurut jumhur fuqaha, selain Mazhab Hanafi, wali disyaratkan seorang laki-laki. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa perempuan tidak memiliki perwalian terhadap dirinya sendiri, apalagi terhadap orang lain.¹⁸

¹⁶ Ahmad Ibnu Taimiyah, *Majmu'ah al-Fatawa*, (Beirut: Dar al-Wafa, 1401 H/ 1981 M), j. 7, hal. 637.

¹⁷ Abu Isa Muhammad ibn Isa al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Mushtafa al-Babi al-Halabi, 1401 H/ 1981 M), j. 4, hal. 364.

Adapun Mazhab Hanafi, mereka berpendapat bahwa laki-laki bukanlah syarat dalam penetapan perwalian. Seorang perempuan yang baligh dan berakal memiliki kekuasaan untuk menikahkan orang yang diwakilkan oleh orang lain kepadanya, dengan cara perwalian atau perwakilan.¹⁹

6. *Rasyid* (Lurus)

Makna *Rusyd* (lurus) di sini menurut Mazhab Hanbali adalah mengetahui kesetaraan dan kemaslahatan pernikahan. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i adalah tidak menghambur-hamburkan harta. *Rusyd* (lurus) adalah syarat yang dikemukakan oleh Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.

7. Tidak Dalam Ihram Haji atau Umrah

Wali adalah orang yang melaksanakan akad (mengucapkan Ijab), dan orang yang sedang melaksanakan ihram untuk haji maupun umrah tidak boleh melakukan akad nikah.

8. Bukan Wali yang Dibenci

9. Tidak Melakukan Pemaksaan

Menurut para ulama, perwalian terjadi disebabkan karena lima hal,²⁰ yaitu: pertama, hubungan kekerabatan, baik kekerabatan yang dekat, seperti ayah dan kakek, maupun kekerabatan yang jauh, seperti paman atau anak laki-laki paman. Kedua, hubungan kepemilikan, seperti hamba sahaya dengan tuannya. Ketiga,

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1405 H/ 1985 M), juz 7, hal. 39.

¹⁹ *Ibid*, hal. 40.

²⁰ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Eksiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Van Hove, 2008), jilid 4, hal. 1337.

hubungan yang ditimbulkan karena memerdekakan budak. Perwalian akibat memerdekakan budak adalah hak legal yang dimiliki oleh seseorang terhadap orang yang pernah dimemerdekakannya. Syarat kepemilikan perwalian ini adalah orang yang memerdekakan adalah orang yang berakal dan telah mencapai usia baligh.²¹ Keempat, hubungan Mawali, yaitu hubungan yang ditimbulkan karena perjanjian di antara dua orang yang mengikatkan diri untuk saling membantu apabila salah satu dikenakan denda karena melakukan tindakan pembunuhan. Perwalian yang timbul akibat hubungan mawali ini disebut dengan perwalian *Muwalah*. Untuk menetapkan perwalian ini disyaratkan bahwa orang yang akan diwalikan tidak memiliki ashabah.²² Kelima, hubungan antara penguasa dengan warga negara. Seorang penguasa (kepala Negara) atau wakilnya berhak menjadi wali bagi warganya yang tidak memiliki wali dari hubungan kekerabatan. Di dalam sebuah hadis dinyatakan:

23^أ

Artinya:

Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali (HR. Al-Tirmidzi).

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1405 H/ 1985 M), juz 7, hal. 48.

²² *Ibid*, hal. 48-49.

²³ Abu Isa Muhammad ibn Isa al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Mushtafa al-Babi al-Halabi, 1401 H/ 1981 M), j. 4, hal. 229.

B. Kedudukan Wali dalam Pernikahan

Keberadaan wali dalam pernikahan memang masih diperdebatkan, apakah ia menjadi syarat atau rukun atau tidak mempengaruhi keberlangsungan dan keabsahan pernikahan sama sekali. Ulama Mazhab Hanafi mengatakan bahwa wali bukanlah salah satu rukun nikah.²⁴ Tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa nikah tidak sah tanpa adanya wali. Mereka berpendapat bahwa apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri, maka hukumnya tidak sah.²⁵ Mereka mendasarkan pendapat mereka pada hadis-hadis Nabi, seperti:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ.²⁶

Artinya:

Tidak ada pernikahan melainkan dengan seorang wali. (H.R. Al-Tirmidzi).

لَا تَزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تَزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا.²⁷

Artinya:

Wanita tidak boleh menikahkan wanita lain dan tidak boleh pula menikahkan dirinya sendiri. (H.R. Ibnu Majah).

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ لِمَنْ
وَلِيَ لَهُ.²⁸

²⁴ Muhammad Jawwad Mughniyyah, *Al-Fiqh 'ala al-madzahib al-khamsah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H/ 1985 M), j. 3, hal. 227.

²⁵ Abu Zakaria Muhyiddin ibn Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/ 1997 M), juz. 3, hal. 308.

²⁶ Abu Isa Muhammad ibn Isa al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Mushtafa al-Babi al-Halabi, 1401 H/ 1981 M), j. 4, hal. 226.

²⁷ Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1416 H/ 1996 M), j. 1, hal. 606.

Artinya:

Wanita mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Apabila telah terjadi hubungan suami isteri, maka laki-laki itu wajib membayar mahar atas sikapnya yang telah menghalalkan kehormatan wanita tersebut. Apabila seorang wali enggan menikahkan seorang wanita, maka pihak penguasa (hakim) bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. (H R. Abu Daud).

Di samping eksistensi wali sebagai salah satu rukun nikah dipertentangkan oleh para *fuqaha'*, syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk sah menjadi wali pun juga dipertentangkan oleh para ahli fikih. Di antara syarat yang dipertentangkan oleh para *fuqaha'* tersebut adalah keadilan yang dimiliki wali. Ulama mazhab Hanafi, pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki, satu pendapat dalam mazhab Syafi'i serta satu riwayat dari mazhab Hanbali mengatakan bahwa adil bukanlah satu syarat wali. Sementara satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, begitu juga satu pendapat dalam mazhab Hanbali serta pendapat yang kurang masyhur di dalam mazhab Maliki mengatakan bahwa adil merupakan salah satu syarat wali.²⁹ Dengan demikian, menurut golongan ini, orang yang fasiq³⁰ tidak sah menjadi wali.³¹

Pendapat ulama tentang keberadaan wali dalam pernikahan dapat dijabarkan sebagai berikut:

²⁸ Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1417 M/ 1997 H), j. 2, hal. 391-392.

²⁹ Tim Penyusun, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam, 1403 H/ 1983 M), j. 41, hal. 254.

³⁰ Fasiq (*Fisq*) didefinisikan dengan keluar dari ketaatan. Ibn Taimiyah mengatakan bahwa kefasiqan tersebut kadang-kadang dilakukan dalam bentuk meninggalkan sesuatu yang difardhukan, dan kadang-kadang dilakukan dengan cara melakukan dosa besar. Di antara bentuk kefasiqan adalah minum khamar dan berzina. Lihat Ahmad Ibnu Taimiyah, *Majmu'ah al-Fatawa*, (Beirut: Dar al-Wafa, 1401 H/ 1981 M), j. 7, hal. 637.

³¹ Tim Penyusun, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam, 1983), ju. 32, h. 141.

1. Pendapat Imam Abu Hanifah.

Di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat di dalam harus atau tidak adanya wali dalam nikah, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sah nikah wanita dewasa yang berakal tanpa adanya wali, wanita dewasa dapat menjadi wali dalam nikahnya juga nikah wanita lain, dengan syarat calon suaminya sekufu, dan maharnya tidak kurang dari mahar yang berlaku pada masyarakat sekitar. Apabila wanita itu menikah dengan orang yang tidak seskufu dengannya maka walinya boleh membatalkan nikah.

2. Pendapat Jumhur (Imam Syafi'i, Maliki dan Hanbali)

Pendapat jumhur ulama (Imam Syafi'i, Maliki dan Hanbali) berpendapat bahwa nikah tidak sah tanpa adanya wali. Sebagian besar ulama fikih berpendapat bahwa seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri atau orang lain. Jika dia menikah tanpa wali, maka pernikahannya batal atau tidak sah. Dan ini merupakan pendapat banyak sahabat seperti Ibnu Umar, Ali Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Aisyah r.a. Dan begitu juga menurut Said bin Musayyab, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Tsauri, Ibnu Abi Layla, Ibnu Syibrimah, Ibnu Mubarak, Ubaidullah bin Anbari, Ishaq dan Abu Ubaidah.

Adapun argumentasi yang dikemukakan oleh Jumhur ulama fikih tersebut, menurut Sayyid Sabiq, adalah:

1. Hadis Nabi riwayat Abu Musa yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيَّ عَدْلٍ (رواه الدار قطني)³²

Artinya:

Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. (HR. Dar al-Quthni).

Dan hadis Nabi riwayat ‘Aisyah yang berbunyi:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ³³

Artinya:

Siapun wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya adalah batal. (HR. Abu Daud).

Berbeda dengan Abu Hanifah, Syafi’i berpendapat bahwa hadis ahad yang dijamin keasliannya (sahih) boleh diterima dan harus didahulukan daripada analisis akal pikiran.

2. Perkawinan itu mempunyai beberapa tujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, dan di dalam kehidupan biasanya laki-laki lebih mampu untuk menjaga tujuan ini, adapun wanita kemampuannya biasanya terbatas oleh faktor-faktor psikologis, lingkungan dan lainnya, maka sebaiknya pelaksanaan akad nikah diserahkan kepada walinya. Oleh sebab itu ia tidak boleh melakukan akad nikah secara langsung. Akad nikah harus dilakukan oleh walinya supaya tujuan perkawinan dapat tercapai secara sempurna.

³² *Ibid*, hal. 314.

³³ Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy’ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1417 M/ 1997 H), j. 2, hal. 391-392.

3. Al-Syafi'i hidup di Baghdad dan Mesir yang mana di kedua daerah tersebut, para wanita dinikahkan ketika menginjak baligh atau sesudah mengalami menstruasi yaitu pada kisaran 10-15 tahun. Tentu saja seorang gadis pada masa seperti itu belumlah bisa memutuskan sesuatu yang sepenting nikah oleh cara pikirannya sendiri. Bahkan di abad modern, perempuan pada usia 10-15 tahun masihlah dianggap anak-anak dan belum dewasa. Berbeda dengan pendapat mayoritas ulama fikih tersebut, Imam Abu Hanifah dan muridnya Abu Yusuf berpendapat bahwa perempuan dewasa yang berakal sehat memiliki hak melaksanakan akad nikah langsung tanpa wali, baik gadis maupun janda, baik menikah dengan laki-laki yang sekufu atau tidak.

Adapun argumentasi yang diajukan oleh Abu Hanifah dan Abu Yusuf adalah:

1. Nash al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 232 yang artinya:
Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya...(al-Baqarah: 232)
2. Syafi'i menggunakan hadis ahad yang menyatakan tidak sah suatu pernikahan kecuali atas izin walinya."La nikaha illa bi wali." Sedangkan Abu Hanifah, tidak mau menerima hadis ini karena dinilai tidak memenuhi syarat untuk dijadikan hujjah atau dalil. Sebabnya, menurut Abu Hanifah, sebuah hadis yang bisa diterima haruslah mencapai

tingkatan mutawatir, yaitu hadis Nabi yang tidak mungkin terjadinya penipuan atau kebohongan atas hadis yang dibawa.

3. Perempuan bebas melakukan akad jual-beli dan akad-akad lainnya, karena itu ia bebas melakukan akad nikahnya. Karena tidak ada perbedaan hukum antara akad nikah dengan akad-akad lainnya.
4. Hadis-hadis yang mengaitkan sahnya perkawinan dengan ijin wali bersifat khusus, yaitu ketika sang perempuan yang akan menikahkan dirinya itu tidak memenuhi syarat untuk bertindak sendiri, misalnya karena masih belum dewasa atau tidak memiliki akal sehat.
5. Berbeda dengan asy-Syafi'i, Abu Hanifah hidup di Kota Kufah, di masa banyak pemalsuan hadis yang terjadi di tengah Kufah yang sudah menjadi kota kosmopolitan. Perempuan Kufah pada masa itu sudah terbiasa melakukan nikah pada kisaran 18-22 tahun, sebuah takaran umur yang lebih dewasa dari pada takaran usia nikah di Baghdad. Pada umur segitu, para wanita tentu sudah bisa mandiri dalam mengambil keputusan sehingga ia bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Maka dari itu Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan muslim berhak untuk menikahkah dirinya sendiri walau walinya tidak setuju atau tidak mengetahuinya.

Meskipun terdapat pendapat yang membolehkan perempuan dewasa dan memiliki akal sehat untuk melakukan pernikahan sendiri, namun pendapat ini bukanlah pendapat yang diterima dan berlaku secara umum di dunia Muslim. Di Indonesia, misalnya, dalam Kompilasi Hukum Islam

dijelaskan bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan, dan tanpa wali perkawinan tidak sah. Pada era modern ini terdapat pemikiran tentang masalah perwalian dalam perkawinan dari seorang ilmuwan yang bernama Mohammed Arkoun, Untuk mengkaji ulang masalah perwalian dalam perkawinan dengan kaca mata Arkoun, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengkaji praktek sejarah yang pernah terjadi pada masa tersebut, demi melakukan pembongkaran (dekonstruksi) terhadap konsep perwalian dalam perkawinan yang berlaku selama ini, yaitu untuk mengetahui kebiasaan yang dominan pada saat itu, yang mempengaruhi pembentukan pemikiran hukum Islam tentang wali bagi perempuan dalam perkawinan. Dari perkawinan di Arabia pra-Islam hingga awal Islam terdapat pergeseran peran wali di dalam perkawinan seiring dengan perubahan status perempuan dalam perkawinan yang sedang diperjuangkan oleh Islam pada saat itu. Pada masa arab pra Islam terdapat perkawinan ba'al yang menggunakan pembayaran mahar oleh peminang kepada wali perempuan yang sebenarnya mengikuti logika jual-beli. Dalam hal ini, wali perempuan sebagai penjual, sang peminang sebagai pembeli, dan sang perempuan sebagai barang yang dijual. Hal ini sangat mungkin dipengaruhi oleh kondisi kehidupan perdagangan yang cukup pesat di Mekkah pada saat itu. Konsep perkawinan yang mengikuti logika jual-beli tersebut, kemudian diperbarui oleh Islam dengan memperbaiki makna mahar yang sebelumnya dianggap sebagai harga pembelian bagi seorang perempuan

yang dinikahi, menjadi pemberian yang tidak disertai dengan harapan menerima imbalan apa pun, sebagai bukti rasa cinta dan ikatan kekerabatan serta kasih sayang dan mengatur pemberian mahar kepada perempuan. Tujuan al-Qur'an dalam hal yang terakhir ini adalah untuk mentransfer istri dari posisi sebagai objek penjualan menjadi seorang pelaku kontrak yang sebagai ganti karena dia telah memberikan hak untuk berhubungan seksual dengan dirinya, berhak mendapatkan mahar. Akan tetapi, spirit al-Qur'an tersebut tampaknya masih sulit untuk ditangkap dengan baik oleh kebiasaan yang berlaku pada saat itu. Akibatnya, konsep perkawinan pada masa awal Islam masih menyesuaikan dengan kultur patriarkal dan norma-norma androsentris yang mendominasi pada saat itu. Dalam pengertian bahwa wali yang menikahkan perempuan tetap ada di dalam konsep perkawinan dan perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri, kecuali janda. Meskipun demikian, perlu dipahami, bahwa Islam tentu saja tidak dapat melakukan pembaruan konsep perkawinan secara radikal, melainkan secara bertahap seiring dengan perkembangan kultur yang berlaku pada suatu masa. Karena jika tidak demikian, tentu saja pembaruan Islam akan sulit untuk dapat diterima masyarakat Arabia pada saat itu. Dalam kondisi ketika kaum perempuan belum memiliki hak-hak yang sama dengan kaum laki-laki, perempuan pada saat itu banyak mengalami pembatasan, termasuk untuk memperoleh pendidikan maupun berperan di wilayah publik. Situasi yang demikian ini tentu saja mengakibatkan sebagian

besar perempuan pada saat itu kurang berpengalaman dan berpendidikan, sehingga kurang cakap apabila melakukan tindakan hukum sendiri. Dalam konteks inilah, perempuan masih membutuhkan perwalian dalam perkawinan, untuk memberikan perlindungan kepada perempuan agar tidak menjadi korban penipuan. Namun, sangat disayangkan, bahwa peran wali yang berlaku temporal ini kemudian cenderung digeneralisir sebagai berlaku universal bagi semua perempuan oleh ulama fikih yang datang kemudian. Akibatnya, dalam membahas konsep perkawinan, ulama fikih masih cenderung menggunakan analogi akad penjualan, dan menggunakan logika hukum penjualan, dalam mana perempuan masih menjadi objek dan bukan subjek dalam akad perkawinan. Bahkan, melalui hak *ijbar*, seorang wali dapat memaksa anak perempuannya atau perempuan di bawah perwaliannya ke dalam suatu perkawinan tanpa ijinnya. Oleh karena itu, dalam konteks saat ini, ketika sudah terdapat pengakuan akan kedudukan kaum perempuan yang sama dengan kaum laki-laki di masyarakat, selain juga kaum perempuan sudah tidak mendapatkan pembatasan untuk mendapatkan pendidikan maupun berperan di wilayah publik, maka adalah bertentangan dengan jaman (*anachronic*) dan kultur saat ini untuk tetap menempatkan perempuan sebagai pihak yang tidak cakap hukum di dalam melakukan akad perkawinan. Spirit al-Qur'an untuk mentransfer perempuan dari posisi sebagai objek dalam perkawinan menjadi seorang pelaku akad perkawinan perlu diangkat kembali, setelah sebelumnya tertimbun oleh

tumpukan masa dan kultur yang cenderung patriarkis, kemudian diimplementasikan dalam tatanan kehidupan masyarakat saat ini. Dari pembahasan sebelumnya dapat dilihat bahwa sebenarnya peran wali dalam perkawinan telah mengalami pergeseran di sepanjang sejarah. Dari sebagai penjual perempuan dalam perkawinan pada masa Arabia pra-Islam, kemudian menjadi pelindung perempuan ketika tidak cakap untuk menikah sendiri pada masa awal Islam. Namun, sangat disayangkan, bahwa peran wali sebagai pelindung yang kondisional ini kemudian cenderung digeneralisir sebagai berlaku universal bagi semua perempuan oleh ulama fikih yang datang kemudian. Oleh karena itu, dalam konteks saat ini, konsep perwalian dalam perkawinan bagi perempuan perlu diperbarui, sehingga dapat memberikan kesempatan bagi perempuan dewasa untuk melakukan akad perkawinan sendiri. Dengan demikian, status perempuan yang selama ini sebagai objek dalam akad perkawinan, karena senantiasa di bawah perwalian, dapat diperbaiki menjadi subjek dalam akad perkawinan, seperti halnya kaum laki-laki.

Pendapat Imam Abu Hanifah, jika nikah tidak diharuskan dengan adanya wali, maka akan banyak orang-orang yang menikah seenaknya tanpa izin wali yang bersangkutan. Sedangkan kelebihan pendapat Imam Abu Hanifah tentang wanita boleh menikahkan dirinya sendiri mengangkat derajat wanita kepada derajat yang lebih terhormat, dimana wanita pada pergeseran zaman dan keadaan mengalami perkembangan sehingga wanita berada pada posisi yang

sama dengan laki-laki. Pendapat Jumhur ulama (Imam Syafi'i, Hanbali dan Maliki). Namun kekurangan adalah adanya diskriminasi terhadap perempuan dimana ia tidak boleh melakukan transaksi untuk dirinya, serta menganggap wanita berada pada derajat yang lebih rendah dari pada kaum pria. Kelebihannya adalah adanya rasa aman yang timbul sebab adanya izin dari wali, sebab pernikahan merupakan sebuah pilihan hidup yang akan dijalani seseorang, maka wanita dengan pilihan hidupnya harus berdasarkan pengetahuan wali.

C. Pembagian Wali dalam Pernikahan

Perwalian secara garis besar ada dua macam, yaitu *al-Wilayah al-'Ammah* (perwalian umum) dan *al-Wilayah al-Khashshah* (perwalian khusus). Perwalian khusus ada dua macam, yaitu *al-Wilayah 'ala al-Mal* (perwalian atas harta) dan *al-Wilayah 'ala al-Nafs* (perwalian atas diri).

Khusus di dalam persoalan pernikahan, para ulama fikih membagi wali menjadi dua, yaitu :

1. Wali Mujbir (*al-Wilayah al-Ijbar*)

Wali Mujbir adalah wali yang memiliki kekuasaan dan wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa izin orang yang bersangkutan.

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan siapa saja yang dipandang termasuk Wali Mujbir. Menurut Mazhab Maliki dan Hanbali, yang termasuk Wali Mujbir itu ada tiga, yaitu (a) Pemilik hamba sahaya

terhadap hambanya, (b) Ayah, baik cerdas maupun tidak, (c) orang yang diberi wasiat oleh ayah. Ahmad bin Hanbal memberikan persyaratan bagi orang yang diberi wasiat oleh ayah, yaitu ayah yang menentukan laki-laki yang akan menjadi suami anaknya, maharnya tidak boleh lebih rendah dari mahar mitsl, dan suami yang dipilihkan itu bukanlah orang fasiq.

Menurut Mazhab Syafi'i wali mujbir hanya ada dua, yaitu pemilik hamba sahaya terhadap hambanya, dan ayah serta kakek. Kakek dipandang sebagai wali mujbir karena ia dipandang sebagai ayah apabila ayah tidak ada.³⁴

Adapun Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa semua Ashabah adalah wali mujbir.³⁵

Tidak semua wanita yang berada di bawah perwalian yang bisa dipaksa oleh wali mujbir untuk menikah. Orang-orang yang bisa dipaksa oleh wali mujbir untuk melangsungkan pernikahan adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang tidak memiliki atau kehilangan kecakapan untuk bertindak hukum, seperti anak kecil dan orang gila. Orang gila bisa dipaksa oleh walinya karena kekurangan akalunya. Sementara 'illat berlakunya Ijbar terhadap anak kecil diperselisihkan oleh ulama. Menurut Ulama Hanafiyah 'illat-nya adalah usianya yang kecil, sementara Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa 'illatnya adalah perawan.³⁶ Berdasarkan hal ini, menurut Ulama Syafi'iyah, seseorang yang sudah baligh akan

³⁴ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, hal. 111.

³⁵ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, hal. 111.

³⁶ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, hal. 110.

tetapi masih perawan masih berlaku Ijbar atas dirinya. Hal ini disebabkan karena seorang yang perawan tidak memiliki pengalaman tentang pernikahan, sehingga ia belum tahu laki-laki yang baik dan yang buruk bagi dirinya.³⁷

- b. Wanita yang masih perawan akan tetapi sudah baligh dan berakal.
- c. Wanita yang telah kehilangan keperawanan, baik karena sakit, dipukul, terjatuh atau berzina.

2. Wali *Mukhayyir* (*al-Wilayah al-Ikhtiyar*)

Al-Wilayah al-Ikhtiyar disebut juga dengan Wilayah al-Syirkah. Imam Abu Hanifah menyebut perwalian ini dengan istilah al-Wilayah al-Istihbab.³⁸ Seseorang yang memiliki al-Wilayah al-Ikhtiyar disebut dengan Wali Mukhayyir. Wali Mukhayyir adalah wali yang tidak memiliki kekuasaan memaksa orang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah.

Perwalian ini disebut dengan Wilayah al-Ikhtiyar karena seorang wanita tidak bisa melakukan akad atas dirinya sendiri, akan tetapi bersekutu dengan walinya dalam menentukan (ikhtiyar) calon suami. Di samping itu itu disebut juga dengan Wilayah al-Syirkah, karena seorang wali tidak bisa

³⁷ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, hal. 110.

³⁸ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, hal. 108.

memaksakan kehendaknya untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya.³⁹

Dilihat dari hubungan kekerabatannya dengan pengantin, ulama fikih membagi wali menjadi tiga, yaitu :

1. Wali Nasab, yaitu wali yang memiliki pertalian darah (nasab) dengan orang yang akan dinikahkan.
2. Wali Hakim, yaitu orang yang diangkat oleh penguasa (pemerintah) untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa Wali Hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali hakim dapat menggantikan kedudukan wali nasab apabila :
 - a. Calon mempelai wanita tidak memiliki wali nasab.
 - b. Apabila walinya enggan untuk menikahkan.
 - c. Apabila walinya gha'ib.
 - d. Apabila yang menikahi (si peminang/calon suami) adalah walinya sendiri.⁴⁰
3. Wali Muhakkam, seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali di dalam akad nikah mereka. Orang yang bisa diangkat sebagai wali muhakkam adalah orang lain yang terpandang,

³⁹ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, hal. 108.

⁴⁰ Audh bin Raja' al-Aufi, *al-Wilayah fi al-Nikah*, (Madinah : Maktabah al-Malik al-Fahd al-Wathaniyah, 202), Juz 2, hal. 172-173.

disegani, luas ilmu fikihnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki.⁴¹

Wali Muhakkam baru bisa ditunjuk apabila tidak ada wali nasab dan tidak ada wali hakim.

⁴¹ M Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), cet. Ke-2, hal. 25.